

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang 30 Tahun 2008*, PT. Refika Aditama, Bandung

Adji, Oemar Seno, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta.

Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Burhan, Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djamali, R. Abdoel, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kohar, A, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.

Lamintang, P.A.F, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan Secara Yuridis dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

_____, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mandiri, Fokusindo 2014, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Fokusindo Mandiri, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.

Sing, Ko Tjay, 1978, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, PT Gramedia, Jakarta.

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Susanto, Anton Freddy, 2004, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Tobing, G.H.S Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

_____, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Tesis / Seminar Ilmiah

Ali Hasim, “Implementasi Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terkait Pemanggilan Notaris Oleh Pihak Kepolisian di Kabupaten Sleman”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Asadori, “Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pengadilan Negeri

Semarang” Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Elvira, Oei, *”Perlindungan Hukum Bagi Notaris dan Akta Notaris Terhadap Tindakan Penyidik Polisi Di Kota Makassar”*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

Syahrur, Arie, *”Penyalahgunaan hak ingkar Notaris dalam Penyidikan Perkara Pidana” Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Latumenten, Pieter E., Ketua bantuan Hukum dan Pendampingan Anggota Ikatan Notaris Indonesia, dalam Seminar Nasional Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Boyolali.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).